

KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PEMBUDIDAYAAN SARANG WALET DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

Willi Ariyanti^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Anwar Parawangi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the process of government coordination in the cultivation of swallow nests and also the government's efforts in coordinating the cultivation of swallow nests in Mangkutana District, East Luwu Regency. This study used a qualitative research method with a descriptive type of research. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of this study showed that government coordination in the cultivation of swallow nests in Mangkutana District, East Luwu Regency, namely: 1) Directing, the government had not been effective in the process of directing the community because regulations regarding swallow nests did not yet exist, 2) Integrating, the government sought to unify what was the needs of the cultivating community and the community around the building, 3) Coordinate, the coordination process had not been maximized due to coordination being an obstacle. 3 (three) government efforts in coordination, 1) Unity of Action, maximizing the data collection process to facilitate coordination, 2) Communication, government officials were committed to improving coordination with the sharing and consultation process, 3) Cooperation, carried out by Mangkutana District government officials and the community had run well.

Keywords: coordination, government, wallet nest cultivation

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet dan juga upaya pemerintah dalam melakukan koordinasi pembudidayaan sarang walet yang berada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, yaitu: 1) Mengarahkan, pemerintah belum efektif dalam proses mengarahkan masyarakat dikarenakan regulasi terkait sarang walet belum ada, 2) Mengintegrasikan, pemerintah berupaya dalam menyatukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya dan masyarakat di sekitar bangunan, 3) Mengkoordinasikan, proses koordinasi yang belum maksimal dikarenakan koordinasi yang menjadi hambatan. 3 (tiga) upaya pemerintah dalam koordinasi, 1) Kesatuan Tindakan, memaksimalkan proses pendataan untuk mempermudah koordinasi, 2) Komunikasi, aparat pemerintah berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan proses sharing dan konsultasi, 3) Kerjasama, dilakukan aparat pemerintah Kecamatan Mangkutana dan masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: koordinasi, pemerintah, pembudidayaan sarang walet

* williariyanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitas, pembangunan produksi peternakan, sarana prasarana produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sektor peternakan merupakan salah satu bagian usaha yang hampir merata dan dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mendefinisikan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, dan bakal, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen yang sedang berkembang di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yaitu usaha sarang burung walet.

Pemerintah Kecamatan Mangkutana melihat usaha sarang burung walet sebagai salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat. Namun penangkaran sarang walet ini juga menimbulkan dampak negatif antara lain suara bising dari kastet burung walet yang ada digedung yang sangat mengganggu masyarakat sekitar, kotoran burung yang

walet yang berakibat tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan. Hal inilah yang membuat masyarakat yang berada di sekitar lingkungan merasa terganggu.

Hal ini dijelaskan dalam teori Sumodiningrat dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dalam tiga hal yaitu: 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); 2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); 3) Memberi perlindungan (*Protecting*).

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan koordinasi antara Dinas Pertanian Khususnya Bidang peternakan, Camat, Desa dan juga Masyarakat peternak. Koordinasi penting dilakukan agar setiap kegiatan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini penting dilakukan oleh setiap instansi maupun setiap organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan dan menyatupadankan.

Menurut Hasibuan (2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegritaskan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para

bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi didefinisikan sebagai suatu usaha kerjasama beberapa badan, unit, dan instansi terkait sehingga dalam pelaksanaan tugas tertentu perlu menyatukan pendapat dalam menyelesaikan suatu tugas. Pada dasarnya koordinasi akan menciptakan hubungan kerja sama dan kesatuan tindakan antar aparat pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas yang diembannya sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Manullang (2008:12) *coordinating* atau mengkoordinasikan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahannya sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan ini antara lain memberikan intruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran.

Minimnya koordinasi yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah yang memiliki fungsi tugas yang sama khususnya di Kecamatan

Mangkutana Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan berbagai macam koordinasi tidak terlaksana secara optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam usahanya masyarakat menghadapi beberapa kendala diantaranya dalam hal penentuan lokasi pembudidayaan, karena keterbatasan para penangkar terhadap lokasi yang seharusnya bisa di jadikan tempat pembudidayaan sarang walet. Pendirian gedung sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur masih tidak sesuai pada tempatnya sehingga mengganggu masyarakat yang berada di sekitar bangunan.

Semua hal tersebut hanya akan dapat tercapai apabila terjalin hubungan koordinasi yang baik antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat, Desa, dan juga Masyarakat. Menurut Sudi Rohman (2017) Koordinasi dapat disebut sebagai kerjasama karena dalam koordinasi terkadang sinkronisasi, sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua orang atau instansi yang melakukan kerjasama satu sama lainnya untuk mempengaruhi. Koordinasi juga dapat dikatakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat,

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang ditentukan.

Hasibuan (2006:88) berpendapat: 1) Kesatuan Tindakan Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi, kesatuan pada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam hasil pencapaian; 2) Komunikasi, tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi; 3) Kerjasama, pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini terkadang tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka, kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih.

Menurut Eunike Lois Caroline Pangalila (2015), koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena

koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi yang dimaksud sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dan satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Novia Wahyu Prabandary (2017), Koordinasi juga dijadikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan kerjasama antara institusi atau unit terkait terhadap penyesuaian bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan dari tiap bagian-bagian dapat terlaksanakan secara maksimal dan terealisasikan dalam suatu kesatuan tindakan.

Menurut Hasibuan (2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang

sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap Langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Koordinasi pemerintah merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membantu pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain.

Pemerintah dalam hal ini berperan untuk menjaga suatu system ketertiban di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Siagian mengemukakan ada empat pokok pemerintah, yaitu: Pertama,

memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenan ceof peace and order*); Kedua, pertahanan dan keamanan; Ketiga, diplomatik; dan Keempat, perpajakan.

Sedangkan menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu: 1) Fungsi Primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberadaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah; 2) Fungsi Skunder, yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan. artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi skunder pemerintah.

Menurut Chamber (1995) pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membengun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecented, participatory, empowerment and sustainable*.

Menurut Mardikanto (2003) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan. Proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar

terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlintas dalam pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Adapun jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari bacaan seperti buku-buku, kajian pustaka, dan literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan Kesimpulan.

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Triangulasi Sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber; 2) Triangulasi Teknik dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Informasi atau data yang ditemukan melalui wawancara diperiksa dengan observasi dan dokumen; dan 3) Triangulasi Waktu yaitu dalam hal pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana koordinasi pemerintah dalam

pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, penulis menggunakan 3 proses koordinasi pemerintah menurut Hasibuan (2009) yaitu mengarahkan, mengintegrasikan, mengintegrasikan. Dan juga 3 upaya pemerintah dalam proses koordinasi menurut Hasibuan (2006:88) yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, dan kerjasama.

Mengarahkan

Mengarahkan yaitu proses yang dilakukan berdasarkan apa yang menjadi permasalahan yang ada didalam lingkungan masyarakat. Koordinasi pemerintah yang berfokus pada proses mengarahkan yaitu untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan apa yang menjadi penghambat dalam proses mengarahkan masyarakat dalam pembangunan sarang walet.

Dalam proses mengarahkan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan kepada Camat, Desa, Tim penyuluh peternakan, Stie Trantib dan juga masyarakat peternak walet belum terlaksana secara efisien terkait pengarah terhadap penentuan lokasi budidaya sarang burung walet, saat ini Dinas Pertanian masih mengarahkan terkait tentang proses pembudidayaan dan proses pemeliharaan.

Proses mengarahkan yang dilakukan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur akan berjalan dengan baik apabila perda yang berkaitan dengan izin pembangunan sarang burung walet sudah ada.

Dalam hal ini Camat Mangkutana dan juga Stie Trantib memberikan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat pembudidaya terhadap dampak yang akan terjadi apabila terus menerus mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan terkait dengan bangunan yang sudah permanen ataupun belum permanen. Data-data ini digunakan untuk mempermudah proses pengarah yang lebih efektif apabila regulasi terkait burung walet sudah ada.

Selain itu Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat, Stie Trantib mengarahkan masyarakat untuk memperhatikan bangunan yang mereka dirikan, mengenai kelayakan bangunan, keamanan bangunan dan juga jarak bangunan walet dengan permukiman masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, semua kebutuhan aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dengan baik dan semua usulan yang disampaikan bukan hanya sekedar keinginan tetapi memang

menjadi kebutuhan dari masyarakat.

Mengintegrasikan

Mengintegrasikan yaitu proses menggabungkan dan menyatukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya walet dan juga masyarakat yang berada di tengah permukiman sarang walet.

Pemerintah sudah melakukan kerjasama untuk menggabungkan hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan di masyarakat yang berada di tengah pembudidayaan sarang walet dan juga masyarakat pembudidayaan. Dalam hal ini pemerintah sepakat untuk memberikan penyuluhan dan pendataan terkait dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah ini sudah sedikit membantu masyarakat yang berada di tengah bangunan sarang walet. upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu seperti memberikan penyemprotan densifektan dan juga pemerintah meminta kepada masyarakat untuk mematikan suara yang ada di gedung setiap jam 9 malam agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini mendapatkan respon positif oleh masyarakat pembudidaya. masyarakat pembudidaya juga sepakat untuk melakukan arahan yang di berikan

oleh pemerintah. dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya efektif tetapi upaya yang dilakukan pemerintah sudah sedikit membantu masyarakat yang berada di tengah bangunan sarang walet.

Mengkoordinasikan

Mengkoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan saran dari para anggota organisasi, bahan dan sumber-sumber lain yang terdapat organisasi itu ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama.

Koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dilakukan untuk meningkatkan keselarasan dalam melakukan berbagai tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan koordinasi yang dilakukan tergantung dari apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan koordinasi.

Proses koordinasi yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sudah ada tetapi belum efektif terkait dengan pembangunan gedung sarang walet. dalam hal ini pemerintah sudah turun langsung mensurvei terkait kelayakan bangunan yang akan didirikan di tengah

permukiman masyarakat. adapun hal yang menjadi penghambat proses koordinasi yaitu penegakan terkait HO dan IMB yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur belum dapat di jalankan untuk saat ini.

Dikarenakan koordinasi belum bisa dilaksanakan secara eektif karena regulasi belum ada sampai saat ini, maka pemerintah terkait spakat untuk melakukan koordinasi secara persuasif ketika ada hal-hal yang yang berkaitan tentang pembangunan seperti jika ada masyarakat dalam masyarakat maka masyarakat akan melakukan musyawarah duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.

Meskipun proses koordinasi belum berjalan secara efektif tetapi Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat, Stie Trantib tidak mengabaikan hal ini. aparat pemerintah tetap berusaha untuk membuat regulasi terkait burung walet dengan melakukan pendataan di setiap wilayah di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang telah memiliki gedung sarang walet. data yang telah dapatkan di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat regulasi terkait burung walet.

Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota

organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Kesatuan tindakan pada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keselarasan dalam mencapai hasil.

Kesatuan Tindakan dalam hal ini bagaimana pemimpin harus mengatur usaha-usaha yang berkaitan dengan pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana, sehingga mendapatkan keserasian di dalam mencapai hasil.

Camat Mangkutana melakukan koordinasi sersama Stie Trantib dan juga Desa yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur terkait dengan pembangunan dan pembudidayaan sarang burung walet. hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan terkait pembudidayaan sarang walet.

Dalam hal ini Camat Mangkutana sudah berupaya untuk memaksimalkan proses penyuluhan dan pendataan kepada masyarakat pembudidaya sarang burung walet. upaya yang dilakukan oleh

pemerintah ini sudah dipahami oleh masyarakat pembudidaya.

Meskipun regulasi terkait burung walet belum ada, tetapi masyarakat pembudidaya tetap melakukan aturan-aturan yang sementara dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pembudidaya sudah siap apabila regulasi terkait pembangunan sarang walet sudah ada. Jika regulasi itu sudah ada masyarakat sudah siap untuk menerima peraturan-peraturan baru seperti pembayaran pajak dan juga izin mendirikan bangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup membantu masyarakat pembudidaya dan juga masyarakat yang ada di tengah gedung bangunan sarang walet.

Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana. Sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Komunikasi yang dilakukan dalam hal ini untuk membantu proses berjalannya koordinasi antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat dan juga Masyarakat pembudidaya sarang walet maupun

Masyarakat yang tinggal di tengah bangunan sarang walet.

Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan cukup berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dikarenakan regulasi terkait pembangunan sarang walet belum ada hingga saat ini. Tetapi Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan melakukan beberapa upaya seperti melakukan sharing dan konsultasi kepada para pengusaha sarang walet.

Selain itu pemerintah juga memaksimalkan proses koordinasi melalui komunikasi yang baik antara masyarakat pembudidaya sarang walet. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi selisih paham antara masyarakat pembudidaya dan juga masyarakat yang tinggal di tengah bangunan sarang walet.

Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini terdapat tiga unsur pokok yang melekat pada satu kerangka, kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Desa, Stie Trantib, Masyarakat pembudidaya sarang walet

dan juga Masyarakat yang tinggal di tengah bangunan sarang burung walet. kerjasama ini dilakukan agar mempermudah proses koordinasi agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan bekerjasama dengan Camat Mangkutana, Desa dan juga Stie Trantib untuk memberikan peraturan sementara sambil pemerintah menunggu regulasi terkait pembangunan sarang walet sudah ada.

Kerjasama yang dilakukan dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan dan juga pendataan terkait dengan pembangunan sarang burung walet. sebelum para pembudidaya sarang walet mendirikan bangunan mereka akan melakukan koordinasi kepada pemerintah terkait lahan yang akan di gunakan untuk mendirikan bangunan. hal ini menjadi salah satu inisiatif dari pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah melihat langsung apakah bangunan yang akan didirikan berdekatan dengan permukiman masyarakat ataukah jauh dari permukiman masyarakat. pemerintah memberikan arahan apabila masyarakat mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat maka masyarakat pembudidaya sarang walet harus sepakat untuk menyempatkan densifektan minimal satu bulan dua kali

untuk menghindari penyebaran virus, masyarakat pembudidaya juga harus sepakat untuk mematikan suara pada gedung walet setiap jam 9 (Sembilan) malam agar tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitar bangunan.

Kebijakan sementara yang dilakukan pemerintah ini sudah berjalan dengan baik. Para peternak walet sudah memahami dan mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah untuk sementara waktu. Karena hal ini juga dapat membantu para pembudidaya walet untuk tidak berselisih paham dengan masyarakat yang berada di tengah bangunan sarang walet.

Dengan melihat segala bentuk kerjasama yang dilakukan seperti arahan yang sementara di lakukan pemerintah terkait pembangunan sarang walet oleh pemerintah membuat masyarakat bisa percaya bahwa hal ini bisa membantu masyarakat pembudidaya sarang walet.

KESIMPULAN

Mengarahkan, Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan juga pemerintah Kecamatan Mangkutana belum bisa mengarahkan proses pembudidayaan sarang walet. hal ini dikarenakan regulasi terkait yang mengatur tentang sarang walet belum ada sampai saat ini.

Mengintegrasikan, proses mengintegrasikan belum dapat dikatakan efektif tetapi pemerintah sudah berusaha memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti memberikan sosialisasi terkait dampak pembangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan untuk mempermudah mempersiapkan regulasi.

Mengkoordinasikan, dalam hal ini koordinasi yang dilakukan baru bersifat persuasif dalam artian bahwa ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembangunan misalkan aduan masyarakat setempat akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Kesatuan Tindakan, dalam hal menyatukan tindakan berjalan dengan baik walaupun masih terkendala dengan permasalahan regulasi yang selama ini belum ada. tetapi pemerintah berupaya untuk memaksimalkan proses sosialisasi dan juga pendataan.

Komunikasi, komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait pembudidayaan sarang burung walet berjalan dengan cukup maksimal walaupun masih terhalang dengan regulasi. upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memaksimalkan proses sosialisasi terkait dampak mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga proses pendataan

jumlah masyarakat yang memiliki sarang burung walet.

Kerjasama, kerjasama yang dilakukan aparat pemerintah Kecamatan Mangkutana dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dalam melakukan pendataan, pemantauan dan juga sosialisasi terkait pembudidayaan sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, B., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie, 1*(1).
- Awala, Y., Kasend, V. & Singko, F. (2018). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Aertembag Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1*(1).
- Ervina, K. P. (2018). Koordinasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang Dengan Pelindo 1 Dalam Pengelolaan Parkir Pelabuhan Sri Bintang Pura Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). *Jurnal Ilmu Pemerintahan.*
- Endah Kiki. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Iliah Ilmu Pemerintahan, 6*(1).
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggreani, V. N. L. (2015). Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik, 3*(12), 2070–2076.

- Muslimin. (2020). *Koordinasi Pendamping Lokal Desa Di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto* (Skripsi, Ilmu Administrasi Negara).
- Noor Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1*.
- Rohman, S. (2017). Koordinasi Camat Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integratif, 5(3), 437–447*.
- Susilo, E. O. (2019). *Dampak Maraknya Usaha Sarang Burung Walet Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).
- Susilowati, E. (2018). Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum, 4(1)*.
- Wungo, A. S. (2020). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).